



RENCANA KERJA

(RENJA)

TAHUN ANGGARAN 2020



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

OPD : DINAS SOSIAL,

PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KABUPATEN PURBALINGGA

TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala, karena berkat rahmat dan hidayahNya sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (RENJA) 2020 Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga.

RENJA Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2020 merupakan kesinambungan gerak dan langkah Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mewujudkan Visi, Misi dan Sasaran yang telah dituangkan dalam RENSTRA Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. RENJA Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 disusun atas dasar RENSTRA Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dengan adanya RENJA Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga ini, diharapkan seluruh bidang dan pihak-pihak terkait lainnya memiliki pedoman atau acuan untuk merencanakan program dan kegiatan yang akan dibiayai dengan APBD dan APBN maupun sumber pendanaan lainnya. Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak menyumbangkan

*Rencana Kerja DINSOSDALDUKKBP3A
Kabupaten Purbalingga Tahun 2020*

pemikirannya dan tenaga dalam menyusun RENJA Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga tahun 2020. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi kemajuan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak guna mencapai taraf hidup masyarakat yang lebih layak dan terkendalinya laju pertumbuhan penduduk serta mengurangnya angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di kabupaten Purbalingga secara optimal.

Purbalingga, Desember 2019
Kepala DINSOSDALDUKKBP3A
Kabupaten Purbalingga

RADITYA WIDAYAKA. AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19750619 199501 1 001

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang Masalah..... 3
- 1.2. Landasan Hukum..... 4
- 1.3. Maksud dan Tujuan..... 6
- 1.4. Sistematika Penulisan..... 6

BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU (TAHUN $n - 2 = 2018$)

- 2.1. Evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu dan capaian renstra perangkat daerah.....11
- 2.2. Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah..... 24
- 2.3. Isu – Isu penting tentang penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah..... 35
- 2.4. Review terhadap rencana awal RKPD..... 36

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaah terhadap kebijakan nasional..... 49
- 3.2. Tujuan dan sasaran renja DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga..... 50
- 3.3. Program dan kegiatan..... 51

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V PENUTUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja perangkat daerah dan pencapaian renstra perangkat daerah	13
Tabel 1.2 Rencana Strategis DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga tahun 2016 – 2021.....	25
Tabel 1.3 Pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah.....	26
Tabel 1.4 Review terhadap rencana awal RKPD tahun 2019.....	41
Tabel 1.5 Hubungan antara prioritas pembangunan nasional dengan prioritas pembangunan daerah.....	53
Tabel 1.6 Rumusan rencana program dan kegiatan perangkat daerah tahun 2019 Dan prakiraan maju tahun 2020.....	56
Tabel 1.7 Rencana kerja dan pendanaan.....	66

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (RENJA) Merupakan acuan dari setiap perangkat daerah dalam mengoprasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang dapat digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah yang lebih terarah.

Penyusunan RENJA berpedoman pada renstra DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga dan mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Penyusunan RENJA bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Rencana Kerja DINSOSDALDUKKBP3A merupakan bagian yang utuh dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis (RENSTRA) DINSOSDALDUKKBP3A. Keduanya merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dan peraturan menteri dalam negeri nomor 28 tahun

2009 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 23 tahun 2007 tentang pedoman tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan demikian program dan kegiatan pembangunan yang ada pada dokumen perencanaan diatur secara rinci dalam rencana kerja (RENJA).

Rencana Kerja DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 memuat rumusan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang dilengkapi dengan dana indikatif serta sumber dananya.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum yang melatarbelakangi penyusunan Renja DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 223 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 3 Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 8 Seri E Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Purbalingga;

13. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 90 Tahun 2008 tentang Penjabaran Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga:
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021.
15. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 51 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Renja OPD adalah untuk menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun anggaran 2020 bagi seluruh aparatur lingkup Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga guna mewujudkan tujuan yang diharapkan. Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga tahun 2020 adalah untuk mempertajam prioritas program dan kegiatan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan, sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun Sistematika Penulisan dalam Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2020 Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut.

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menjelaskan tentang pengertian secara ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RPJMD, Renstra Perangkat daerah ssrta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

B. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan, perencanaan dan penganggaran perangkat daerah.

C. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat daerah.

D. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat daerah, serta susunan garis besar dari isi dokumen.

BAB II. Hasil Evaluasi Renja PD Tahun Lalu (Tahun n-2 = 2018)

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun lalu dan Capaian Rensta PD, (Tabel T – C.29: Lampiran Permendagri Nomor. 86 Tahun 2017 hal 403).

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu (Tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan renja perangkat daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target renstra perangkat daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan renja perangkat daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

(Tabel T-C30: Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 hal 404).

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan perangkat daerah dan hal kritis terkait dengan pelayanan perangkat daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional dan internasional;
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah;
5. Formulasi isu –isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review Terhadap Rencana Awal RKPD

(Tabel T-C31: Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 hal 405).

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rencana awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;

3. Penjelasan temuan temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rencana awal RKPD.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PD

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan

(Tabel T-C33: Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 hal 408).

Berisikan penjelasan mengenai:

1. Faktor faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan;
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan;

3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rencana awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatof, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V. PENUTUP.

Berisikan Uraian Penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
- b. Kaidah kaidah pelaksanaan;
- c. Rencana tindak lanjut,.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU

(TAHUN n-2 = 2018)

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun lalu dan Capaian Renstra PD.

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Pengukuran laporan Kinerja dilakukan dengan menggunakan konsep *Value of Money* Penggunaan konsep tersebut memerlukan indikator-indikator sebagai berikut;

- a. Indikator masukan (Input), Untuk mengukur jumlah sumber daya seperti anggaran (Dana), SDM, Peralatan, Material dan masukan lainnya untuk melakukan suatu kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat dianalisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan.

- b. Indikator Keluaran (Output), Merupakan indikator yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun non fisik.
- c. Indikator Hasil (Outcome), Merupakan indikator yang menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan-kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada jangka panjang.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan renja DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 dan 2019 adalah sebagai berikut.

Tabel.1.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD Tahun lalu dan Capaian Renstra PD s/d tahun berjalan

Urusan/Bidang, Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016 - 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2019)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR									
SOSIAL									
Program Penguatan Kelembagaan Pereangkat Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelayanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Penyediaan dan Bahan Jasa Perkantoran	Jumlah kebutuhan administrasi pegawai yang di penuhi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah perjalanan dinas. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	1800	600	300	300	100%	300	1200	66.6 %

*Rencana Kerja DINSOSDALDUKKBP3A
Kabupaten Purbalingga Tahun 2020*

	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang terpelihara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pemeliharaan TMP	Jumlah TMP yang terjaga kebersihan dan keamanannya	1	1	1	1	100%	1	1	100%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah Pengadaan sarana dan prasarana kantor yang dilaksanakan	540	180	90	90	100%	90	360	66.6 %
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Jumlah pegawai yang mendapat pendidikan dan pelatihan	270	90	45	45	100 %	45	180	66.6 %
	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD	Jumlah dokumen yang tersusun	-	-	-	-	-	90	90	-
	Pemeliharaan Gedung UPT	Jumlah UPT yang gedungnya terpelihara	-	-	-	-	-	4	4	-
	Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	Cakupan LKS yang dibina	100%	100 %	100%	100%	100 %	100%	100%	100%
	Pembinaan dan Fasilitasi Lembaga Kesejahteraan Sosial	Jumlah karang taruna yang dibina	1800	600	300	300	100%	300	1200	66.6 %
		Jumlah Penanganan kasus PMKS	1032	344	172	172	100%	172	688	66.6 %
	Pendataan Verifikasi, Validasi data kemiskinan	Jumlah data kemiskinan pada PMKS dan data BDT yang menjadi sumber dalam penentuan bantuan	1032	344	172	172	100%	172	688	66.6 %

*Rencana Kerja DINSOSDALDUKKBP3A
Kabupaten Purbalingga Tahun 2020*

Program fasilitasi, penanganan dan rehabilitasi korban bencana	Cakupan korban bencana yang tertangani	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Penyaluran bantuan bencana alam dan bencana sosial	Jumlah pemberian bantuan kepada korban bencana alam dan bencana sosial	108	36	18	18	100%	18	72	66.6 %
Program Pelayanan, Pemberdayaan dan Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Cakupan PMKS yang direhabilitasi sosial	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Fasilitasi program perlindungan sosial	Jumlah peserta PKH yang di fasilitasi	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah RTLH dan Program KUBe yang difasilitasi	18	6	3	3	100%	3	13	66.6%
	Jumlah lanjut usia yang difasilitasi	1536	512	256	256	100%	256	1024	66.6%
Pembinaan dan Rehabilitasi PMKS	Jumlah penyandang disabilitas yang dilayani dan direhabilitasi	1206	402	201	201	100%	201	804	66.6%
	Jumlah PMKS yang terjaring dan di tangani	1032	344	172	172	100%	172	688	66.6%
	Jumlah PMKS yang di beripenyuluhan/bimbin	60	20	10	10	100%	10	40	66.6%

*Rencana Kerja DINSOSDALDUKKBP3A
Kabupaten Purbalingga Tahun 2020*

	gan sosial/ketrampilan praktis								
	Jumlah penyandang disabilitas yang mengikuti kegiatan porseni	150	50	25	25	100%	25	100	66.6%
Pembinaan dan fasilitasi SDM dan penyelenggara kesejahteraan sosial	Jumlah panti sosial dan panti rehabilitasi yang dibina	720	240	120	120	100%	120	480	66.6%
	Jumlah PMKS yang di data	1032	344	172	172	100%	172	688	66.6%
	Jumlah PMKS yang di bina dan di beribantuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah PSM yang dibina	60	20	10	10	100%	10	40	66.6%
Oprasional Rumah Singgah	Oprasional Rumah Singgah	140	-	-	-	-	40	40	28.5%
Pengadaan alat bantu bagi lanjut usia (DAK)		9	-	-	-	-	-	-	-
Revitalisasi dan pengadaan Perangkat Pengolah data (DAK)		100	-	-	-	-	-	-	-
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									
Program Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Institusi KB	Rasio Petugas Lapangan Keluarga Berencana, Pemetaan Profil Kependudukan	1:1	1:2	1:2	1:2	100%	1:2	1:6	16.6 %

*Rencana Kerja DINSOSDALDUKKBP3A
Kabupaten Purbalingga Tahun 2020*

Pembinaan dan Fasilitasi kelompok KB	Jumlah kelompok KB yang dibina	90	30	15	15	100%	15	60	66.6%
Pembinaan dan Fasilitasi jaringan institusi KB	Jumlah Peserta KB yang difasilitasi jaringan institusi KB	42	14	7	7	100%	7	28	66.6%
	Jumlah fasilitasi fapsedu	-	-	-	-	-	2	2	-
Pembinaan, Pengembangan dan fasilitasi KKBPK	Jumlah kegiatan fasilitasi kualisi kependudukan	-	-	-	-	-	1	1	-
	Jumlah laporan bulanan	-	-	-	-	-	1	1	-
Advokasi dan KIE	Jumlah laporan semesteran dan laporan tahunan	-	-	-	-	-	2	2	-
	Jumlah lini lapangan yang dibina	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Profil dan Analisis Data Kependudukan	Jumlah KIE dan Advokasi melalui media masa	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Jumlah profil kependudukan						2	2	
	Jumlah data keluarga	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Program Peningkatan Pelayanan, Perlindungan dan Pembinaan Kepesertaan KB	Jumlah kegiatan fasilitasi pendidikan kependudukan	-	-	-	-	-	1	1	-
	Cakupan Pasangan Usia Subur yang Ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need KB)	9%	23.25	11,50	11,50	100%	11%	45.75	5.08 %

*Rencana Kerja DINSOSDALDUKKBP3A
Kabupaten Purbalingga Tahun 2020*

Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan, Peserta KB aktif dan Kb baru serta Perlindungan Efek samping KB	Jumlah pembinaan peserta KB baru dan KB aktif	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Jumlah pelayanan ayoman medis bagi Peserta KB	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Penyediaan Sarana dan Prasarana KB (DAK)	Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana untuk pelayanan KB	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Pembinaan Program KB Berbasis Masyarakat (DAK Non Fisik)	Jumlah kader PPKBD dan Sub PPKBD yang di bina	7.208	-	1802	1802	100%	1802	3.604	50%
Oprasional Balai Penyuluhan dan Distribusi Alokon (DAK Non Fisik)	Jumlah penyuluh yang di beri bantuan oprasional DAK Non Fisik dan pemberian oprasional distribusi alkon	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pengadaan media KIE dan Managemen (DAK Non Fisik)	Jumlah Peserta KB Aktif	47.743	-	10.764	10.764	100%	11.172	21.936	45.9%
Program Pemberdayaan Keluarga	Jumlah NKKBS	1.748.928	584.527	293.039	293.039	100%	293,039	1.062.605	60.7%
Pembinaan Pengembangan dan Fasilitasi Keluarga Sejahtera	Jumlah kader kelompok BKS yang dibina	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Jumlah kader UPPKS yang dibina	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Pembinaan Ketahanan Keluarga dan	Jumlah kegiatan PIK-R	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Jumlah kegiatan BKB	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

*Rencana Kerja DINSOSDALDUKKBP3A
Kabupaten Purbalingga Tahun 2020*

Kesejahteraan Reproduksi Remaja										
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK										
Program Pengarusutamaan Gander Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang Tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
PenguatanKelembagaan PemberdayaanPerempan dan Perlindungan Anak	Jumlah UPT penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terfasilitasi	12	4	2	2	100 %	2	8	66.6%	
	Jumlah penangan tindak pidana perdagangan orang	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
Pembinaan, Fasilitasi, dan Evaluasi PUG dan PPRG	Jumlah PPRG dan PUG yang terfasilitasi	12	4	2	2	100 %	2	8	66.6%	
	Jumlah peringatan hari ibu dan hari kartini Tingkat kabupaten	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Jumlah profil gander yang disusun	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Jumlah kegiatan gerakan sayang ibu dan bayi (GSIB)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	

*Rencana Kerja DINSOSDALDUKKBP3A
Kabupaten Purbalingga Tahun 2020*

Pembinaan, Fasilitasi dan Evaluasi PUHA	Jumlah kecamatan layak anak yang dibentuk	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Jumlah peringatan hari anak nasional tingkat kabupaten	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja DINSOSDALDUKKBP3A Tahun 2018 sehingga dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Urusan sosial, (program penguatan kelembagaan perangkat daerah, program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial, program fasilitasi penanganan dan rehabilitasi korban bencana dan Program Pelayanan pemberdayaan dan Rehabilitasi penyandang masalah kesejahteraan sosial.)
 - a. Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah dengan indikator Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelayanan memiliki target akhir Renstra tahun 2021 sebesar 100 % dengan target dan realisasi renja di tahun 2017 sebesar 100% dan pada tahun 2018 dengan target dan realisasi renja 100 % sehingga tingkat Realisasi pada tahun 2018 sebesar 100 %. Pada tahun 2019 target renja sebesar 100 % dengan perkiraan realisasi sebesar 100 % pada realisasi capaian tahun berjalan 2019 dengan tingkat capaian realisasi target Renstra sebesar 100 %.
 - b. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dengan indikator kinerja Cakupan LKS yang dibina pada target akhir Renstra 2016-2021 yaitu 100 % dengan realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan pada tahun 2017 sebesar 100 %, target dan realisasi kinerja program dan kegiatan sampai dengan tahun lalu (2018) yang mencapai tingkat realisasi sebesar 100 % dan ditahun 2019 target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah sebesar 1200 orang telah terealisasi sehingga perkiraan Realisasai capaian target renstra perangkat daerah

sampai dengan tahun berjalan (2019) memiliki tingkat capaian realisasi sebesar 66.6 % dari target akhir renstra 2016 – 2021 sebesar 100%.

- c. Program Fasilitasi, Penanganan dan Rehabilitasi Korban Bencana dengan indikator kinerja Cakupan korban bencana yang tertangani dengan target akhir renstra 2016- 2021 sebesar 108 Kecamatan di kabupaten purbalingga. Pada tahun 2017 program tersebut mencapai target realisasi kinerja hasil program dan kegiatan sebesar 36 kecamatan di kabupaten purbalingga dan pada tahun 2018 terget renja dan realisasi renja perangkat daerah sebesar 18 kecamatan di kabupaten purbalingga, sehingga untuk tingkat realisasi di tahun tersebut mencapai 100 %. Pada tahun 2019 target program dan kegiatan renja perangkat daerah yaitu 18 kecamatan di kabupaten purbalingga. Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah sampai dengan tahun berjalan (2019) sebesar 66.6 %, untuk realisasi capaian program dan kegiatan sampai dengan tahun berjalan (2019) adalah 72 kecamatan dari target akhir renstra 2016-2021 108 kecamatan.
 - d. Program Pelayanan, Pemberdayaan dan Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dengan indikator kinerja Cakupan PMKS yang direhabilitasi sosial dengan target kinerja capaian program renstra 2016-2021 sebesar 100 %
2. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Program Pembinaan dan Pengembangan Karingan Institusi KB, Program Peningkatan

Pelayanan, Perlindungan dan Pembinaan Kepesertaan KB, Program Pemberdayaan Keluarga)

- a. Program Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Institusi KB dengan Indikator kinerja Rasio Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan Pemetaan Profil Kependudukan dengan target kinerja capaian program Renstra Perangkat daerah tahun 2016-2021 sebesar 1:1, ditahun 2017 realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sebesar 1 : 2 dan pada tahun 2018 target renja dan realisasi renja perangkat daerah sebesar 1 : 2 sehingga untuk tingkat realisasi di tahun tersebut sebesar 100%. Pada tahun 2019 target program dan kegiatan renja perangkat daerah sebesar 1 : 2, realisasi capaian program dan kegiatan sampai dengan tahun berjalan (2019) sebesar 1 : 6 dengan tingkat capaian realisasi target renstra (2019) sebesar 16,6 %.
- b. Program Peningkatan Pelayanan,Perlindungan dan Pembinaan Kepesertaan KB dengan indikator kinerja Cakupan Pasangan Usia Subur yang Ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need KB) memiliki target kinerja capaian program renstra perangkat daerah tahun 2016-2021 sebesar 9 %, realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan 2017 adalah sebesar 23.25 % dan pada tahun 2018 target renja dan realisasi renja perangkat daerah sebesar 11.50 % sehingga untuk target realisasi pada tahun tersebut adalah 100%. Target program dan kegiatan renja pada tahun 2019 sebesar 10,50 % sehingga perkiraan realisasi capaian target renstra sampai dengan tahun berjalan (2019)

realisasi capaian program dan kegiatan sebesar 45.75% % dan tingkat capaian realisasi target renstra sebesar 5.08 dari target akhir renstra 2016-2021 sebesar 9%.

- c. Program Pemberdayaan Keluarga dengan indikator kinerja Jumlah NKKBS, target kinerja capaian program renstra 2016-2021 sebesar 1.748.928. realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan pada tahun 2017 sebesar 584.527, target renja ditahun 2018 sebesar 293.039 dengan realsasi renja sebesar 293.039 sehingga untuk tingkat realisasi pada tahun tersebut sebesar 100%. Pada tahun 2019 target program dan kegiatan renja sebesar 293.039 dengan realsasi capaian program dan kegiatan sampai dengan tahun berjalan 2019 sebesar 1.170.605 dengan presentase tingkat capaian realisasi target renstra sebesar 66.9 % dari target kinerja capaian program renstra 2016-2021 sebesar 1.748.928.

3. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Program Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak).

- a. Program Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan indikator Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tertangani pada target kinerja capaian program renstra 2016-2021 sebesar 100%, ditahun 2017 realisasi target kinerja hasil program dan keluaran sebesar 100 % dan pada tahun 2018 target

renstra dan realisasi renstra sebesar 100%, sehingga untuk tingkat realisasi di tahun tersebut adalah sebesar 100%.

Pada tahun 2019 target program dan kegiatan kenja sebesar 100% dengan realisasi capaian program dan kegiatan samapai dengan tahun berjalan sebesar 100% dengan tingkat capaian realisasi rensta pada tahun 2019 sebesar 100 %.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Sesuai dengan Dokumen Renstra DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 yang telah disusun dan dilakukan

review pada tahun 2018 maka hubungan antara tujuan, sasaran serta indikatornya adalah sebagai berikut:

Tabel. 1.2 Rencana Strategis DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 - 2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Indikator Sasaran				
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya kesejahteraan Sosial Masyarakat	Berkembangnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	PMKS yang terlayani	40	50	60	70	80
2	Terkendalinya pertumbuhan penduduk, meningkatnya kesejahteraan keluarga.	Meningkatnya Kepesertaan dan Partisipasi Keluarga berencana	PUS Peserta KB Aktif	77,05	77,1	77,15	77,20	77,25
			PUS Unmetneed KB	11,5	11	10,5	10	9
3	Meningkatnya keberdayaan perempuan dan perlindungan anak.	Meningkatnya Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan	Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	44	44	42	40	39
			Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Yang Tertangani	100	100	100	100	100
			Cakupan Desa / Kelurahan Layak Anak	7,5	7,5	13,38	79,04	83,6
			Prdikat Kabupaten Layak Anak	500	500	500	500	500

*Rencana Kerja DINSOSDALDUKKBP3A
Kabupaten Purbalingga Tahun 2020*

Analisis Kinerja Pelayanan DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga Sesuai dengan Renstra yang tertuang dalam capaian

sasaran strategis

tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan PD

No	Indikator	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	PMKS yang terlayani	Presentase Kesejahteraan Sosial Masyarakat	40	50	60	70	80	85.58	85.58	70	80	
2	PUS Peserta KB Aktif	Laju Pertumbuhan Penduduk	77,05	77,1	77,15	77,20	77,25	77,69	77,69	77,20	77.25	
3	PUS Unmedneed KB	Prersentase Keluarga Sejahtera	11,5	11	10,5	10	9	10,12	10,12	10	9	
4	Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Indeks Pembangunan gander	44	44	42	40	39	51	51	40	39	
5	Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

*Rencana Kerja DINSOSDALDUKKBP3A
Kabupaten Purbalingga Tahun 2020*

	dan Anak Yang Tertangani											
6	Cakupan Desa/Kelurahan Layak Anak		7,5	7,5	13,38	20,08	26,00	7,5	13,38	79,04	83,6	
7	Prdikat Penilaian Kabupaten/Kota Layak Anak		500	500	500	500	500	280	385	500	500	

1.3.1 PMKS yang terlayani.

Di kabupaten purbalingga, penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga melalui Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Sesuai dengan Misi kelima Bupati Purbalingga untuk Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja. Keterkaitan Misi Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Misi Bupati Purbalingga yaitu :

- a. Mencegah, mengendalikan, mengatasi dan memberdayakan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);
- b. Meningkatkan kepedulian dalam menangani penyaluran korban bencana alam dan bencana sosial.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk urusan sosial yaitu PMKS yang terlayani. Indikator tersebut di atas, merupakan tolak ukur untuk mengetahui sejauh mana jumlah PMKS yang

ada di kabupaten purbalingga dapat tertangani. Pada tahun 201 target PMKS yang terlayani adalah 50 , realisasi sebanyak 85.58 atau sekitar 171.16 %. Pada tahun 2019 target PMKS yang terlayani adalah 60, realisasi sebanyak 85,58 atau sekitar 142.63 %. Bila dibandingkan antara tahun 2018 dan 2019 capaian PMKS yang terlayani telah melebihi target yang ditetapkan.

1.3.2. PUS Peserta KB Aktif

PUS Peserta KB aktif adalah pasangan suami isteri yang sah yang isterinya atau suaminya masih menggunakan alat, obat atau cara kontrasepsi untuk mencegah kehamilan dalam kurun waktu tertentu. Di kabupaten purbalingga, penyelenggaraan PUS Peserta KB aktif dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten Purbalingga melalui Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk guna menuju keluarga sejahtera.

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten purbalingga melauai urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang memliki dua indikator kinerja yaitu PUS Peserta KB Aktif dan PUS Unmetneed KB. Sesuai dengan Misi ke empat bupati purbalingga Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat dan Misi ke enam Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat

dan menarik untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya melalui gerakan masyarakat, yang didukung dengan penyediaan infrastruktur / sarana prasarana wilayah yang memadai. Keterkaitan Misi Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Misi Bupati Purbalingga yaitu ;

1. Menyelenggarakan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
2. Memfasilitasi pembangunan keluarga;
3. Mengembangkan jejaring kemitraan dalam pengelolaan kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten purbalingga terbagi menjadi tiga urusan yaitu urusan sosial dengan satu indikator kinerja, urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dengan dua indikator kinerja, serta urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan empat indikator kinerja. Melalui urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, salah satu indikator kinerja yaitu PUS Peserta KB Aktif merupakan tolak ukur untuk mengetahui seberapa banyak jumlah PUS Peserta KB aktif / Baru di kabupaten purbalingga. Pada tahun 2018 target PUS Peserta KB Aktif adalah 77.10, realisasi sebanyak 77.69 atau sekitar 100.7 %. Pada tahun 2019 target PUS Peserta KB Aktif adalah 77,15 realisasi sebanyak 77,69 atau sekitar 100,6 %. Bila di bandingkan antara tahun 2018 dan 2019 capaian PUS Peserta KB

Aktif mengalami penurunan sebanyak 0.1 % hal ini terjadi dikarenakan dari peserta KB aktif yang ingin memiliki anak lagi / Ingin Anak Segera (IAS).

1.3.3. PUS Unmetneed KB

PUS Unmetneed KB adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin anak ditunda dan tidak ingin anak lagi, ingin ber KB tetapi belum terlayani disebut unmet need. Cakupan ini untuk mengukur akses dan kualitas pelayanan KB yang tidak terpenuhi di suatu daerah. Di kabupaten purbalingga, penyelenggaraan PUS Unmetneed KB di dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten purbalingga melalui Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk guna menuju keluarga sejahtera.

Sesuai dengan Misi ke empat Bupati Purbalingga Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat dan Misi ke enam Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya melalui gerakan masyarakat, yang didukung dengan penyediaan infrastruktur / sarana prasarana wilayah yang memadai. Keterkaitan Misi Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Misi Bupati Purbalingga yaitu ;

1. Menyelenggarakan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
2. Memfasilitasi pembangunan keluarga;
3. Mengembangkan jejaring kemitraan dalam pengelolaan kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga.

Salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu PUS Unmetneed KB, merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengetahui banyaknya PUS yang ingin anak ditunda, tidak ingin anak lagi serta ingin berKB tetapi belum terlayani.

Pada tahun 2018 target kinerja PUS Unmetneed KB sebanyak 11 realisasi sebanyak 10.12 atau sekitar 92 %. Pada tahun 2019 terget kinerja PUS Unmetneed KB sebanyak 10.5 realisasi sebanyak 10,12 atau sekitar 103.7 %.bila dibandingkan antara tahun 2019 dan 2018 PUS unmetneed KB mengalami kenaikan sebanyak 11.7 %.

1.3.4. Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.

Salah satu faktor yang mempengaruhi meningkatnya angka kriminalitas yaitu kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga, melalui urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sesuai dengan Misi ke lima Bupati Purbalingga, Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul

perekonomian utamanya industri pengelolaan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan pekerjaan. Keterkaitan Misi dengan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu Misi ke satu, Mengarusutamakan pembangunan yang berwawasan kependudukan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yaitu kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, merupakan tolak ukur untuk mengetahui banyaknya kasus yang terjadi. Pada tahun 2018 target kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sebanyak 44 kasus, realisasi sebanyak 51 kasus atau 115 %. Pada tahun 2019 target sebanyak 42 kasus, realisasi sebanyak 68 kasus atau 161.9 %. Bila dibandingkan dengan tahun 2018, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tahun 2019 mengalami kenaikan sebanyak 17 kasus. Berdasarkan realisasi diatas, dapat dikategorikan menjadi beberapa kasus sebagai berikut;

- a. Kasus kekerasan terhadap anak (anak usia dalam kandungan sampai dengan 18 tahun) sebanyak 36 kasus, dengan rincian sebagai berikut: anak perempuan sebanyak 30 kasus dan anak laki laki sebanyak 6 kasus. Kasus tersebut diatas adalah kasus kekerasn seksual pada anak;

- b. Kasus kekerasan fisik sebanyak 17 kasus, kasus tersebut seringkali terjadi di lingkungan keluarga / Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
- c. Kasus mental (*Psychis*) sebanyak 6 kasus, kasus *psychis* biasanya berupa perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan rasa tidak berdaya. Kasus tersebut biasanya seringkali terjadi di lingkungan rumah tangga. Sebagai contoh seorang suami berselingkuh didepan istrinya, melontarkan kalimat yang merendahkan, tidak menafkahi secara lahir dan batin (menelantarkan);
- d. Kekerasan ekonomi sebanyak 1 kasus, kekerasan tersebut seringkali terjadi di lingkungan rumah tangga seperti pelantaran ekonomi keluarga / tidak di berikan nafkah;
- e. Lainnya sebanyak 8 kasus, hal tersebut terjadi biasanya pada kasus kecelakaan lakalantas dan miras yang pelakunya masih dalam kategori anak yang masih dalam kategori pengawasan.

1.3.5. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tertangani.

Meningkatnya angka kriminalitas di sebabkan oleh salah satunya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan indikator kinerjanya yaitu kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan acuan dalam mengukur keberhasilan untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terlayani. Kedua indikator tersebut saling berhubungan, sehingga pengaduan kasus kekerasan tersebut dapat diketahui sudah tertangani ataupun belum. Sesuai dengan misi ke kelima bupati purbalingga, Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat,

dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengelolaan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan pekerjaan. Keterkaitan Misi dengan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu Misi ke satu, Mengarusutamakan pembangunan yang berwawasan kependudukan.

Pada tahun 2018 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tertangani terrealisasi sebesar 100 %. Pada tahun 2019 kasus kekerasan terrealisasi sebesar 100 %. Sehingga hal ini dapat dikatakan bahwa setiap terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat tertangani dan terselesaikan dengan baik.

1.3.6. Cakupan Desa / Kelurahan Layak Anak.

Cakupan Desa / Kelurahan Layak Anak merupakan sebuah perwujudan untuk menjadikan kabupaten purbalingga menjadi kabupaten layak anak. Maksud pengembangan Kelurahan/desa Layak Anak (DLA) adalah untuk membangun inisiatif pemerintahan desa/kelurahan, masyarakat dan dunia usaha agar mengembangkan Visi, Misi, Kebijakan, Program, Kegiatan dan kelembagaan pembangunan yang peduli, sensitif dan memihak pada kepentingan terbaik anak dan menjamin terpenuhinya hak anak di kelurahan/desa Dinas Sosial Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak melalui urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dalam bidang tersebut mengampu indikator kinerja yaitu Cakupan desa/kelurahan layak anak. Sesuai dengan misi ke lima bupati purbalingga, Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengelolaan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan pekerjaan. Keterkaitan Misi dengan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu Misi ke satu, Mengarusutamakan pembangunan yang berwawasan kependudukan.

Pada tahun 2018 cakupan desa / kelurahan layak anak sebanyak 7,5 dengan realisasi sebanyak 7,5 atau sekitar 100 %. Pada tahun 2019 cakupan desa /kelurahan layak anak sebanyak 13.61 dan realisasi sebanyak 13.61 atau sekitar 100 %. Bila dibandingkan dengan tahun 2018, cakupan desa / kelurahan layak anak tidak mengalami perubahan. Perhitungan cakupan desa / kelurahan layak anak adalah jumlah desa / kelurahan layak anak yang telah dibentuk dibagi dengan jumlah seluruh desa yang ada kali 100. Pada tahun 2019 cakupan desa / kelurahan layak anak dikabupaten purbalingga adalah sebanyak 32 desa dengan jumlah seluruh desa 239 sekabupaten dibagi 100 atau sekitar 13.61 %.

1.3.7. Predikat Penilaian Kabupaten / Kota Layak Anak.

Predikat Kabupaten Layak Anak adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak setiap kabupaten / kota berlomba lomba untuk mendapatkan predikat tersebut. Namun pada tahun 2019 untuk predikat kabupaten layak anak ditargetkan mendapat 500 nilai namun hanya terealisasi sebesar 280, hal ini terjadi karena belum adanya perda yang mengatur tentang kabupaten layak anak sehingga berdampak pada tidak terpenuhinya nilai, kurangnya dukungan dari OPD – OPD untuk mendukung kabupaten layak anak, sehingga tidak terpenuhinya hasil quizioner lintas sektoral yang hasilnya akan di laporkan secara online melalui aplikasi SIMPONI.

3.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga tidak dapat lepas dari isu –isu strategis yang melingkupinya. Isu – isu strategis yang di maksud antara lain:

1. Masih Tingginya PMKS;
2. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam program KB;
3. Masih banyaknya keluarga yang masuk dalam katagori KS 1 dan Pra KS;
4. Belum optimalnya pembangunan Gender di Kabupaten Purbalingga;
5. Masih tingginya kasus-kasus kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak;
6. Belum optimalnya pemenuhan hak anak.

3.4. Review Terhadap Rencana Awal RKPD

Hasil review terhadap Rencana Awal RKPD dan hasil analisa kebutuhan untuk pelaksanaan Tahun 2019 dapat dijelaskan pada table berikut

Tabel. 1.4 Review Terhadap Rencana Awal RKPD Tahun 2020

No	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program Pengutan Kelembagaan Perangkat Daerah	Dinsosdal dukkbp3a	Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pelayanan	100 %	1.490.204	Program Pengutan Kelembagaan Perangkat Daerah	Dinsosdal dukkbp3a	Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pelayanan	100 %	1.490.204
	Penyediaan dan Bahan jasa Perkantoran	Dinsosdal duk kbp3a	Jumlah kebutuhan adminsitrasi pegawai yang dapat dipenuhi	120 pegawai	584.000	Penyediaan dan Bahan jasa Perkantoran	Dinsosdal dukkbp3a	Jumlah kebutuhan adminsitrasi pegawai yang dapat dipenuhi	120 pegawai	584.000
	Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi	Dinsosdal duk kbp3a	Jumlah perjalanan dinas, rapat – rapat koordinasi dan konsultasi	300 perjalanan	240.079	Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi	Dinsosdal dukkbp3a	Jumlah perjalanan dinas, rapat – rapat koordinasi dan konsultasi	300 perjalanan	240.079
	Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	Dinsosdal duk kbp3a	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang di plihara	1 Bh gedung kantor dan pralatan, mobil, spd motor.	569.250	Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	Dinsosdal dukkbp3a	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang di plihara	1 Bh gedung kantor dan pralatan, mobil, spd motor.	569.250

Rencana Kerja DINSOSDALDUKKBP3A
Kabupaten Purbalingga Tahun 2020

	Pemeliharaan TMP	TMP Purbalingga	Jumlah TMP yang terjaga kebersihan dan keamanannya	2 TMP	56.875	Pemeliharaan TMP	TMP Purbalingga	Jumlah TMP yang terjaga kebersihan dan keamanannya	2 TMP	56.875
	Pendidikan dan pelatihan pegawai	Dinsosdal dukkbp3a	Jumlah Pegawai yang mendapat pendidikan dan pelatihan	78 Orang	30.000	Pendidikan dan pelatihan pegawai	Dinsosdal dukkbp3a	Jumlah Pegawai yang mendapat pendidikan dan pelatihan	78 Orang	30.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja OPD	Purbalingga	Jumlah dokumen yang tersusun	6 Dokumen	10.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja OPD	Purbalingga	Jumlah dokumen yang tersusun	6 Dokumen	10.000
	Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	Dinsosdal dukkbp3a	Cakupan LKS yang dibina	100 %	1.467.087	Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	Dinsosdal dukkbp3a	Cakupan LKS yang dibina	100 %	1.467.087

Rencana Kerja DINSOSDALDUKKBP3A
Kabupaten Purbalingga Tahun 2020

	Pembinaan dan Fasilitasi Lembaga Kesejahteraan Sosial		Jumlah karang taruna yang dibina	2739 orsang	337.262	Pembinaan dan Fasilitasi Lembaga Kesejahteraan Sosial		Jumlah karang taruna yang dibina	2739 orsang	337.262
			Jumlah Penanganan kasus PMKS					Jumlah Penanganan kasus PMKS		
	Pendataan Verifikasi, Validasi data kemiskinan	Dinsosdal dukkbp3a	Jumlah data kemiskinan pada PMKS dan data BDT yang menjadi sumber dalam penentuan bantuan	533.399 orang	1.129.825	Pendataan Verifikasi, Validasi data kemiskinan	Dinsosdal dukkbp3a	Jumlah data kemiskinan pada PMKS dan data BDT yang menjadi sumber dalam penentuan bantuan	533.399 orang	1.129.825
	Program fasilitasi, penanganan dan rehabilitasi korban bencana	Dinsosdal dukkbp3a	Cakupan korban bencana yang tertangani	100 %	50.000	Program fasilitasi, penanganan dan rehabilitasi korban bencana	Dinsosdal dukkbp3a	Cakupan korban bencana yang tertangani	100 %	50.000
	Penyaluran bantuan bencana alam dan bencana sosial	Dinsosdal dukkbp3a	Jumlah pemberian bantuan kepada korban BA dan BS	18 Kecamatan	74.830	Penyaluran bantuan bencana alam dan bencana sosial	Dinsosdal dukkbp3a	Jumlah pemberian bantuan kepada korban BA dan BS	18 Kecamatan	74.830
	Program Pelayanan, Pemberdayaan dan Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Dinsosdal dukkbp3a	Cakupan PMKS yang direhabilitasi social	100 %	2.511.479	Program Pelayanan, Pemberdayaan dan Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Dinsosdal dukkbp3a	Cakupan PMKS yang direhabilitasi social	100 %	2.511.479

Rencana Kerja DINSOSDALDUKKBP3A
Kabupaten Purbalingga Tahun 2020

	Fasilitasi Program Perlindungan Sosial	Dinsosdal dukkbp3a	Jumlah peserta PKH yang di fasilitasi	54.606 orang	692.041	Fasilitasi Program Perlindungan Sosial	Dinsosdal dukkbp3a	Jumlah peserta PKH yang di fasilitasi	54.606 orang	692.041
			Jumlah RTLH dan Program KUBe yang difasilitasi					Jumlah RTLH dan Program KUBe yang difasilitasi		
			Jumlah lanjut usia yang difasilitasi					Jumlah lanjut usia yang difasilitasi		
	Pendataan dan Rehabilitasi PMKS	Kab. Purbalingga	Jumlah penyandang disabilitas yang dilayani dan direhabilitasi	830 orang	448.644	Pendataan dan Asistensi PMKS	Kab. Purbalingga	Jumlah penyandang disabilitas yang dilayani dan direhabilitasi	830 orang	448.644
			Jumlah PMKS yang terjaring dan di tangani					Jumlah PMKS yang terjaring dan di tangani		
			Jumlah PMKS yang di beri penyuluhan/bimbingan sosial/ketrampilan praktis					Jumlah PMKS yang di beri penyuluhan/bimbingan sosial/ketrampilan praktis		
			Jumlah penyandang disabilitas yang dilayani dan direhabilitasi					Jumlah penyandang disabilitas yang dilayani		

Rencana Kerja DINSOSDALDUKKBP3A
Kabupaten Purbalingga Tahun 2020

								dan direhabilitasi		
	Pembinaan dan fasilitasi penyelenggara kesejahteraan sosial	Kab. Purbalingga	Jumlah panti sosial dan panti rehabilitasi yang dibina	3250 orang	1.013.218	Pembinaan dan fasilitasi SDM dan penyelenggara kesejahteraan social	Kab. Purbalingga	Jumlah panti sosial dan panti rehabilitasi yang dibina	3250 orang	1.013.218
			Jumlah PMKS yang di data					Jumlah PMKS yang di data		
			Jumlah PMKS yang di bina dan di berbantuan					Jumlah PMKS yang di bina dan di berbantuan		
			Jumlah PSM yang dibina					Jumlah PSM yang dibina		
	Oprasional Rumah Singgah	Dinsosdal dukkbp3a	Oprasional Rumah Singgah	50 Orang	250.000	Oprasional Rumah singgah	Dinsosdal dukkbp3a	Oprasional Rumah Singgah	50 Orang	250.000
	Pengadaan Peralatan Bantu Bagi Lanjut Usia (DAK)	Dinsosdal dukkbp3a	Jumlah alat bantu bagi lanjut usia yang tersalurkan.	9 orang	8.950	Pengadaan Peralatan Bantu Bagi Lanjut Usia (DAK)	Dinsosdal dukkbp3a	Jumlah alat bantu bagi lanjut usia yang tersalurkan.	9 orang	8.950
	Revitalisasi dan Pengadaan Perangkat Pengolah data (DAK)	Dinsosdal dukkbp3a		100 %	98.626	Revitalisasi dan Pengadaan Perangkat Pengolah data (DAK)	Dinsosdal dukkbp3a		100 %	98.626
	Program Pembinaan dan Pengembangan	Kab. Purbalingga	Rasio Petugas Lapangan Keluarga	100 %	561.681	Program Pembinaan dan Pengembangan	Kab. Purbalingga	Rasio Petugas Lapangan Keluarga	100 %	561.681

Rencana Kerja DINSOSDALDUKKBP3A
Kabupaten Purbalingga Tahun 2020

Jaringan Institusi KB			Berencana, Pemetaan Profil Kependudukan			Jaringan Institusi KB		Berencana, Pemetaan Profil Kependudukan		
	Pembinaan dan Fasilitasi kelompok KB	Kab. Purbalingga	Jumlah kelompok KB yang dibina	270 orang	53.500	Pembinaan dan Fasilitasi kelompok KB	Kab. Purbalingga	Jumlah kelompok KB yang dibina	270 orang	53.500
	Pembinaan dan Fasilitasi jaringan institusi KB	Kab. Purbalingga	Jumlah Peserta KB yang difasilitasi jaringan institusi KB	300 orang	150.521	Pembinaan dan Fasilitasi jaringan institusi KB	Kab. Purbalingga	Jumlah Peserta KB yang difasilitasi jaringan institusi KB	300 orang	150.521
	Pembinaan, Pengembangan dan fasilitasi KKBPK	Kab. Purbalingga	Jumlah fasilitasi fapsedu	35 Unit	74.790	Pembinaan, Pengembangan dan fasilitasi KKBPK	Kab. Purbalingga	Jumlah fasilitasi fapsedu	35 Unit	74.790
Jumlah kegiatan fasilitasi kualisi kependudukan			Jumlah kegiatan fasilitasi kualisi kependudukan							
Jumlah laporan bulanan			Jumlah laporan bulanan							
Jumlah laporan semesteran dan laporan tahunan			Jumlah laporan semesteran dan laporan tahunan							
Advokasi dan KIE	Kab. Purbalingga	Jumlah lini lapangan yang dibina	98 orang	116.733	Advokasi dan KIE	Kab. Purbalingga	Jumlah lini lapangan yang dibina	98 orang	116.733	

Rencana Kerja DINSOSDALDUKKBP3A
Kabupaten Purbalingga Tahun 2020

			Jumlah KIE dan Advokasi melalui media masa					Jumlah KIE dan Advokasi melalui media masa		
	Profil dan Analisis data Kependudukan	Kab. Purbalingga	Jumlah profil kependudukan	315.195 orang	125.762	Profil dan Analisis data Kependudukan	Kab. Purbalingga	Jumlah profil kependudukan	315.195 orang	125.762
Jumlah data keluarga			Jumlah data keluarga							
Jumlah kegiatan fasilitasi pendidikan kependudukan			Jumlah kegiatan fasilitasi pendidikan kependudukan							
	Pengadaan BKB Kit Stunting (DAK Penugasan)	Kab. Purbalingga	Jumlah Pengadaan BKB Kit	5 Set	40.375	Pengadaan BKB Kit Stunting (DAK Penugasan)	5 Set	Jumlah Pengadaan BKB Kit	5 Set	40.375
	Program Peningkatan Pelayanan, Perlindungan dan Pembinaan Kepesertaan KB	Kab. Purbalingga	Cakupan Pasangan Usia Subur yang Ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need KB)	100 %	4.980.610	Program Peningkatan Pelayanan, Perlindungan dan Pembinaan Kepesertaan KB	Kab. Purbalingga	Cakupan Pasangan Usia Subur yang Ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need KB)	100 %	4.980.610

Rencana Kerja DINSOSDALDUKKBP3A
Kabupaten Purbalingga Tahun 2020

	Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan, Peserta KB aktif dan Kb baru serta Perlindungan Efek samping KB	Kab. Purbalingga	Jumlah pembinaan peserta Kb baru dan Kb aktif	152.368 orang	60.509	Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan, Peserta KB aktif dan Kb baru serta Perlindungan Efek samping KB	Kab.Purbalingga	Jumlah pembinaan peserta Kb baru dan Kb aktif	152.368 orang	60.509
			Jumlah pelayanan ayoman medis bagi Peserta KB					Jumlah pelayanan ayoman medis bagi Peserta KB		
	Penyediaan Sarana dan Prasarana KB (DAK)	Kab. Purbalingga	Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana untuk pelayanan KB	85 orang	1.331.753	Penyediaan Sarana dan Prasarana KB (DAK)	Kab. Purbalingga	Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana untuk pelayanan KB	85 orang	1.331.753
	Pembinaan Program KB Berbasis Masyarakat (DAK Non Fisik)	Kab. Purbalingga	Jumlah kader PPKBD dan Sub PPKBD yang di bina	1802 orang	1.434.000	Pembinaan Program KB Berbasis Masyarakat (DAK Non Fisik)	Kab. Purbalingga	Jumlah kader PPKBD dan Sub PPKBD yang di bina	1802 orang	1.434.000
	Oprasional Balai Penyuluhan (DAK Non Fisik)	Kab. Purbalingga	Jumlah penyuluh yang di beri bantuan oprasional DAK Non Fisik	100 %	1.861.776	Oprasional Balai Penyuluhan dan Distribusi Alokon (DAK Non Fisik)	Kab. Purbalingga	Jumlah penyuluh yang di beri bantuan oprasional DAK Non Fisik	100 %	1.861.776

Rencana Kerja DINSOSDALDUKKBP3A
Kabupaten Purbalingga Tahun 2020

	Oprasional Distribusi Alokasi DAK non fisik)	Kab. Purbalingga	Jumlah pemberian oprasional distribusi alkon	100 %	98.952	Oprasional Distribusi Alokasi	Kab. Purbalingga	Jumlah pemberian oprasional distribusi alkon	100 %	98.952
	Pengadaan media KIE dan Manajemen (DAK Non Fisik)	Kab. Purbalingga	Jumlah Peserta KB Aktif	11.172 unit	193.620	Pengadaan media KIE dan Manajemen (DAK Non Fisik)	Kab. Purbalingga	Jumlah Peserta KB Aktif	11.172 unit	193.620
	Program Pemberdayaan Keluarga	Kab. Purbalingga	Jumlah NKKBS	100 %	1.897.992	Program Pemberdayaan Keluarga	Kab. Purbalingga	Jumlah NKKBS	100 %	1.897.992
	Pembinaan Pengembangan dan Fasilitasi Keluarga Sejahtera	Kab. Purbalingga	Jumlah kader kelompok BKS yang dibina	240 orang	71.000	Pembinaan Pengembangan dan Fasilitasi Keluarga Sejahtera	Kab. Purbalingga	Jumlah kader kelompok BKS yang dibina	240 orang	71.000
			Jumlah kader UPPKS yang dibina					Jumlah kader UPPKS yang dibina		
	Pembinaan Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Reproduksi Remaja	Kab. Purbalingga	Jumlah kegiatan PIK-R	86 kegiatan	75.000	Pembinaan Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Reproduksi Remaja	Kab. Purbalingga	Jumlah kegiatan PIK-R	86 kegiatan	75.000
			Jumlah kegiatan BKB					Jumlah kegiatan BKB		
	Program KKBPK di Kampung Kb (DAK Non Fisik)	Kab. Purbalingga	Jumlah kader kelompok BKS dan UPPKS di kampung KB yang dibina	180 orang	1.701.992	Program KKBPK di Kampung Kb (DAK Non Fisik)	Kab. Purbalingga	Jumlah kader kelompok BKS dan UPPKS di kampung KB yang dibina	180 orang	1.701.992

Rencana Kerja DINSOSDALDUKKBP3A
Kabupaten Purbalingga Tahun 2020

	Program Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab. Purbalingga	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang Tertangani	100 %	514.719	Program Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab. Purbalingga	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang Tertangani	100 %	514.719
	Penguatan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab. Purbalingga	Jumlah unit pelayanan terpadu penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terfasilitasi	1 Lembaga	145.656		Kab. Purbalingga	Jumlah unit pelayanan terpadu penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terfasilitasi	1 Lembaga	145.656
			Jumlah penanganan tindak pidana perdagangan orang					Jumlah penanganan tindak pidana perdagangan orang		
	Pembinaan, Fasilitasi, dan Evaluasi PUG dan PPRG	Kab. Purbalingga	Jumlah PPRG dan PUG yang terfasilitasi	1 Lembaga	176.790	Pembinaan, Fasilitasi, dan Evaluasi PUG dan PPRG	Kab. Purbalingga	Jumlah PPRG dan PUG yang terfasilitasi	1 Lembaga	176.790
			Jumlah peringatan hari ibu dan hari					Jumlah peringatan hari ibu dan hari		

Rencana Kerja DINSOSDALDUKKBP3A
Kabupaten Purbalingga Tahun 2020

				kartini Tingkat kabupaten					kartini Tingkat kabupaten		
				Jumlah profil gander yang disusun					Jumlah profil gander yang disusun		
				Jumlah kegiatan gerakan sayang ibu dan bayi (GSIB)					Jumlah kegiatan gerakan sayang ibu dan bayi (GSIB)		
		Pembinaan, Fasilitasi dan Evaluasi PUHA	Kab. Purbalingga	Jumlah kecamatan layak anak yang dibentuk	1 Lembaga	192.273	Pembinaan, Fasilitasi dan Evaluasi PUHA	Kab. Purbalingga	Jumlah kecamatan layak anak yang dibentuk	1 Lembaga	192.273
				Jumlah peringatan hari anak nasional tingkat kabupaten					Jumlah peringatan hari anak nasional tingkat kabupaten		

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PD

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa untuk dilaksanakan dalam mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasara Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Berdasarkan Pancasila, pencapaian tujuan dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah hingga tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 menggariskan Visi Indonesia tahun 2005 yaitu INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR yang pelaksanaannya dibagi dalam empat tahap pembangunan jangka menengah. Pembangunan tahun 2018 berada pada tahap jangka menengah yang ke-empat yang arahnya digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMD) 2015-2019 dengan Visi MEWUJUDKAN INDONESIA YANG BERDAULAT, MAKMUR, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONGROYONG.

Dalam rangka mensinergikan pembangunan nasional dengan pembangunan daerah Kabupaten Purbalingga, maka berdasarkan Rencana Awal RKP Tahun 2020 dan RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 dapat disusun hubungan antara Kebijakan Pembangunan Nasional dengan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 adalah sebagai berikut;

Tabel. 1.5. Hubungan Antara Prioritas Pembangunan Nasional dengan Prioritas Pembangunan Daerah

No	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah
1	Bidang Sumber daya Manusia, Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar	Bidang Penanggulangan kemiskinan Penyediaan basic life acces untuk penduduk miskin, penguatan keberlangsungan hidup layak dan memperkuat basis data kemiskinan.
		Bidang Kualitas hidup dan daya saing SDM Perbaikan kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan, kesehatan dan mempersiapkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi tinggi
2	Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Pengurangan Kesenjangan antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman	
3	Bidang Ekonomi Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri dan Jasa Produktif	
4	Bidang Ketahanan Energi, Pangan dan Sumber Daya Air Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan dan Sumber Daya Air	
5	Bidang Keamanan Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINSOSDALDUKKBP3A KABUPATEN PURBALINGGA.

Hubungan yang selaras antara Renja dan Renstra, maka tujuan dan sasaran Rencana Kerja Tahun 2020 merupakan tujuan dan sasaran RENSTRA DINSOSDALDUKKBP3A tahun 2016 -2021 sebagai berikut.

1. Meningkatnya kesejahteraan sosial kemasyarakatan, dengan sasaran:

- Meningkatnya penyelenggaraan kesejahteraan sosial masyarakat
- Meningkatnya kepesertaan dan partisipasi keluarga berencana.
- Meningkatnya pemenuhan dan perlindungan hak-hak perempuan dan anak korban tindak kekerasan.

Bila dibandingkan dengan pencapaian sasaran Renja Tahun 2019, maka tujuan dan sasaran tersebut relevan dan layak karena merupakan cerminan tugas pokok dan fungsi DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga dalam melaksanakan Pembangunan di kabupaten purbalingga.

3.3. Program dan Kegiatan

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, maka ditentukan indikator kinerja pada program/kegiatan yang mendukungnya. Indikator kinerja program/kegiatan yang dimaksud harus spesifik dan jelas untuk menghindari terjadinya mis-interpretasi, fleksibel terhadap perubahan, dapat diukur dengan baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan mendukung aspek aspek yang relevan. Sehingga ditentukan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Dinsosdaldukb3a Kabupaten Purbalingga sebagai berikut.

Tabel. 1.6 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 dan perkiraan Maju Tahun 2021

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Rencana Tahun 2021	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Idikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Idikatif
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR								
Program Pengutan Kelmbagaan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelayanan	Dinsos dalduk kbp3a	100 %	1.490.204.000	APBD II		100 %	1.235.704.000
Penyediaan dan Bahan Jasa Perkantoran	Jumlah kebutuhan administrasi pegawai yang di penuhi	Dinsos dalduk kbp3a	120 pegawai	584.000.000	APBD II		120 Orang	584.000.000
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah perjalanan dinas. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Dinsos dalduk kbp3a	300 perjalanan	240.079.000	APBD II		300 Perjalanan	240.079.000
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang	Dinsos dalduk kbp3a	1 Bh gedung kantor dan pralatan, mobil, spd motor.	569.250.000	APBD II		1 Bh gedung kantor dan pralatan, mobil, spd motor.	319.250.000
Pemeliharaan TMP	Jumlah TMP yang terjaga kebersihan dan keamanannya	Kab. Pur balingga	2 TMP	56.875.000	APBD II		2 TMP	52.375.000

RENCANA KERJA TAHUN 2020
DINSOSDALDUKKBP3A KABUPATEN PURBALINGGA

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Jumlah pegawai yang mendapat pendidikan dan pelatihan	Dinsos dalduk kbp3a	78 Orang	30.000.000	APBD II		78 Orang	30.000.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD	Jumlah dokumen yang tersusun	Dinsos dalduk kbp3a	6 Dokumen	10.000.000	APBD II		6 Dokumen	10.000.000
Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	Cakupan LKS yang dibina	Kab.Pur-balingga	100 %	2.438.402.000	APBD II		100 %	1.584.681.000
Pembinaan dan Fasilitas Lembaga Kesejahteraan Sosial	Jumlah karang taruna yang dibina	Kab.Pur-balingga	2739 orsang	337.262.000	APBD II		2739 Orang	337.262.000
	Jumlah Penanganan kasus PMKS							
Pendataan Verifikasi, Validasi data kemiskinan	Jumlah data kemiskinan pada PMKS dan data BDT yang menjadi sumber dalam penentuan bantuan	Kab.Pur-balingga	533.399 orang	1.129.825.000	APBD II		533.399 orang	279.651.000
Pembinaan dan fasilitas SDM dan penyelenggara kesejahteraan sosial	Jumlah panti sosial dan panti rehabilitasi yang dibina	Kab.Pur-balingga	110.357 orang	971.315.000	APBD II		110.357 orang	967.768.000
	Jumlah PMKS yang di data							
	Jumlah PMKS yang di bina dan di beribantuan							
	Jumlah PSM yang dibina							
Program fasilitasi, penanganan dan rehabilitasi korban bencana	Cakupan korban bencana yang tertangani	Kab.Pur-balingga	100 %	50.000.000	APBD II		100 %	44.000.000

RENCANA KERJA TAHUN 2020
DINSOSDALDUKKBP3A KABUPATEN PURBALINGGA

Penyaluran bantuan bencana alam dan bencana social	Jumlah pemberian bantuan kepada korban bencana alam dan bencana sosial	Kab.Pur-balingga	18 kec.	50.000.000	APBD II	18 Kec	44.000.000
Program Pelayanan, Pemberdayaan dan Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Cakupan PMKS yang direhabilitasi social	Kab.Pur-balingga	100 %	1.765.420.000	APBD II	100 %	1,588.681.000
Fasilitasi Program Perlindungan Sosial	Jumlah peserta PKH yang di fasilitasi	Kab.Pur-balingga	54.606 orang	655.776.000	APBD II	54.842	554.037.000
	Jumlah RTLH dan Program KUBe yang difasilitasi						
	Jumlah lanjut usia yang difasilitasi						
Pendataan dan Rehabilitasi PMKS	Jumlah penyandang disabilitas yang dilayani dan direhabilitasi	Kab.Pur-balingga	814 orang	859. 644.000	APBD II	814 orang	748.644.000
	Jumlah PMKS yang terjaring dan di tangani						
	Jumlah PMKS yangdiberipenyuluh an/social/ketrampilanpraktis						
	Jumlah penyandang disabilitas yang mengikuti kegiatan porseni.						

RENCANA KERJA TAHUN 2020
DINSOSDALDUKKBP3A KABUPATEN PURBALINGGA

Oprasioanal Rumah Singgah	Oprasional Rumah Singgah	Kab. Purbalingga	40 orang	250.000.000	APBD II		40 orang	250.000.000
Program Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Institusi KB	Rasio Petugas Lapangan Keluarga Berencana, Pemetaan Profil Kependudukan	Kab.Purbalingga	100 %	176.100.000	APBD II		100 %	483.806.000
Pembinaan dan Fasilitasi kelompok KB	Jumlah kelompok KB yang dibina	Kab.Purbalingga	270 orang	55.070.000	APBD II		18 Kelompok	53.500.000
Pembinaan dan Fasilitasi jaringan institusi KB	Jumlah Peserta KB yang difasilitasi jaringan institusi KB	Kab.Purbalingga	300 orang	121.030.000	APBD II		300 orang	113.021.000
Program Pengendalian Penduduk	Pemetaan Profil Kependudukan	Kab.Purbalingga	100 %	404.574.000	APBD II		100 %	
Pembinaan, Pengembangan dan fasilitasi KKBPK	Jumlah fasilitasi fapsedu	Kab.Purbalingga	35 Unit	88.534.000	APBD II		35 unit	74.790.000
	Jumlah kegiatan fasilitasi kualisi kependudukan							
	Jumlah laporan bulanan							
	Jumlah laporan semesteran dan laporan tahunan							
Advokasi dan KIE	Jumlah lini lapangan yang dibina	Kab.Purbalingga	97 orang	177.500.000	APBD II		97 orang	116.773.000
	Jumlah KIE dan Advokasi melalui media masa							
Profil dan Analisis data Kependudukan	Jumlah profil kependudukan	Kab.Purbalingga	309.015 orang	138.540.000	APBD II		309.015 orang	125.762.000

RENCANA KERJA TAHUN 2020
DINSOSDALDUKKBP3A KABUPATEN PURBALINGGA

		Jumlah data keluarga						
		Jumlah kegiatan fasilitasi pendidikan kependudukan						
Program Peningkatan Pelayanan, Perlindungan dan Pembinaan Kepesertaan KB	Cakupan Pasangan Usia Subur yang Inging ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need KB)	Kab.Pur-balingga	100 %	4.994.139.000	APBD II		100 %	4.940.624.000
Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan, Peserta KB aktif dan Kb baru serta Perlindungan Efek samping KB	Jumlah pembinaan peserta Kb baru dan Kb aktif	Kab.Pur-balingga	152.368 orang	130.024.000	APBD II		152.368 orang	60.509.000
	Jumlah pelayanan ayoman medis bagi Peserta KB							
Penyediaan Sarana dan Prasarana KB (DAK)	Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana untuk pelayanan KB	Kab.Pur-balingga	78 Unit	1.410.720.000	APBD II		85 unit	1.410.720.000
Pembinaan Program KB Berbasis Masyarakat (DAK Non Fisik)	Jumlah kader PPKBD dan Sub PPKBD yang di bina	Kab.Pur-balingga	1802 orang	1.434.000.000	APBD II		1802 orang	1.128.153.000
Oprasional Balai Penyuluhan (DAK Non Fisik)	Jumlah penyuluh yang di beri bantuan oprasional DAK Non Fisik	Kab.Pur-balingga	100 %	1.440.000.000	APBD II		100 %	1.450.980.000
Pengadaan media KIE dan Managemen (DAK Non Fisik)	Jumlah Peserta KB Aktif	Kab.Pur-balingga	11.172 unit	456.395.000	APBD II		12.289 unit	838.242.000

RENCANA KERJA TAHUN 2020
DINSOSDALDUKKBP3A KABUPATEN PURBALINGGA

	Pengadaan BKB Kit Stunting (DAK Penugasan)	Jumlah Pengadaan BKB Kit	Kab.Purbalingga	10 Set BKB Kit	60.000.000	APBD II		18 Set BKB Kit	-
	Oprasional distribusi Alokon (DAK non fisik)	Pemberian Distribusi Alokon	Kab.Purbalingga	100 %	63.000.000	APBD II		100 %	52.020.000
Program Pemberdayaan Keluarga		Jumlah NKKBS	Kab.Purbalingga	100 %		APBD II		100 %	2.020.000.000
	Pembinaan Pengembangan dan Fasilitasi Keluarga Sejahtera	Jumlah kader kelompok BKS yang dibina	Kab.Purbalingga	240 orang	146.000.000	APBD II		240 orang	125.000.000
		Jumlah kader UPPKS yang dibina							
	Pembinaan Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Reproduksi Remaja	Jumlah kegiatan PIK-R	Kab.Purbalingga	58 kegiatan	75.000.000	APBD II		86 kegiatan	71.000.000
		Jumlah kegiatan BKB							
	Program KKBPK di Kampung Kb (DAK Non Fisik)	Jumlah kader kelompok BKS dan UPPKS di kampong KB yang dibina	Kab.Purbalingga	144 orang	1.900.000.000	APBD II		180 orang	1.824.000.000
Program Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang Tertangani	Kab.Purbalingga	100 %		APBD II		100 %	434.719.000
	Penguatan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah unit pelayanan terpadu penanganan korban kekerasan terhadap	Kab.Purbalingga	1 Lembaga	195.525.000	APBD II		1 Lembaga	145.656.000

RENCANA KERJA TAHUN 2020
DINSOSDALDUKKBP3A KABUPATEN PURBALINGGA

		perempuan dan anak yang terfasilitasi						
		Jumlah penanganan tindak pidana perdagangan orang						
Pembinaan, Fasilitasi, dan Evaluasi PUG dan PPRG		Jumlah PPRG dan PUG yang terfasilitasi	Kab.Pur-balingga	1 Lembaga	108.343.000	APBD II	1 Lembaga	96.790.000
		Jumlah peringatan hari ibu dan hari kartini Tingkat kabupaten						
		Jumlah profil gander yang disusun						
		Jumlah kegiatan gerakan sayang ibu dan bayi (GSIB)						
Pembinaan, Fasilitasi dan Evaluasi PUHA		Jumlah kecamatan layak anak yang dibentuk	Kab.Pur-balingga	1 Lembaga	209.278.000	APBD II	1 Lembaga	192.273.000
		Jumlah peringatan hari anak nasional tingkat kabupaten						

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja (RENJA) merupakan acuan setiap perangkat daerah (PD) dalam mengoprasikan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih baik.

Penyusunan RENJA berpedoman pada RENSTRA DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga dan Mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan RENJA bukanlah kegiatan yang berdisi sendiri, merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Rencana Kerja DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga merupakan bagian yang utuh dari rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) DINSOSDALDUKKBP3A. Keduanya merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dan peraturan menteri

dalam negeri Nomor 28 Tahun 2009, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007, tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dengan demikian program dan kegiatan pembangunan yang ada pada dokumen perencanaan diatur secara rinci dalam Rencana Kerja (RENJA).

RENCANA KERJA TAHUN 2020
DINSOSDALDUKKBP3A KABUPATEN PURBALINGGA

Rumusan rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2020 DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada table di bawah ini.

Tabel. 1.7 Rencana Kerja Dan Pendanaan

No	Tujuan Rnstra	Sasaran Renstra	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Tahun 2020		Lokasi
					Target Kinerja	Rp	
1	Meningkatnya kesejahteraan Sosial Masyarakat	Meningkatnya pelayanan terhadap PMKS, korban bencana dan kelompok masyarakat rentan lainnya	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR				
			Program Pengutan Kelmbagaan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelayanan	100 %	1.490.204.000	
			Penyediaan dan Bahan Jasa Perkantoran	584.000.000	120 pegawai	584.000.000	
			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	240.079.000	300 perjalanan	240.079.000	
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	569.250.000	1 Bh gedung kantor dan pralatan, mobil, spd motor.	569.250.000	
		Pemeliharaan TMP	52.375.000	2 TMP	56.875.000		
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	30.000.000	78 orang	30.000.000	

RENCANA KERJA TAHUN 2020
DINSOSDALDUKKBP3A KABUPATEN PURBALINGGA

			Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD		10.000.000	6 Dokumen	10.000.000		
Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial									
			Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	Cakupan LKS yang dibina		100 %	2.438.402.000		
			Pembinaan dan Fasilitasi Lembaga Kesejahteraan Sosial	Jumlah karang taruna yang dibina		2739 Orang	63.258.000		
				Jumlah Penanganan kasus PMKS					
			Pendataan Verifikasi, Validasi data kemiskinan	Jumlah data kemiskinan pada PMKS dan data BDT yang menjadi sumber dalam penentuan bantuan		533.399 Orang	889.651.000		
			Pembinaan dan fasilitasi SDM dan penyelenggara kesejahteraan sosial	Jumlah panti sosial dan panti rehab ilitasi yang dibina		110.357 orang	971.315.000		
				Jumlah PMKS yang di data					
				Jumlah PMKS yang di bina dan di beribantuan					
				Jumlah PSM yang dibina					
Program fasilitasi, penangan dan rehabilitasi korban bencana									
			Program fasilitasi, penangan dan rehabilitasi korban bencana	Cakupan korban bencana yang tertangani		100 %	74.830.000		

RENCANA KERJA TAHUN 2020
DINSOSDALDUKKBP3A KABUPATEN PURBALINGGA

			Penyaluran bantuan bencana alam dan bencana social	Jumlah pemberian bantuan kepada korban bencana alam dan bencana social	18	74.830.000	
			Program Pelayanan, Pemberdayaan dan Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Cakupan PMKS yang direhabilitasi social	100 %	1.498.261.000	
			Fasilitasi Program Perlindungan Sosial	Jumlah peserta PKH yang di fasilitasi	54.606 orang	692.041.000	
				Jumlah RTLH dan Program KUBe yang difasilitasi			
				Jumlah lanjut usia yang difasilitasi			
			Pendataan dan Rehabilitasi PMKS	Jumlah penyandang disabilitas yang dilayani dan direhabilitasi	814 Orang	448.644.000	
				Jumlah PMKS yang terjaring dan di tangani			
				Jumlah PMKS yang di beri penyuluhan/bimbingan sosial/ketrampilan praktis			
				Jumlah penyandang disabilitas yang mengikuti kegiatan porseni.			

RENCANA KERJA TAHUN 2020
DINSOSDALDUKKBP3A KABUPATEN PURBALINGGA

			Oprasional Rumah Singgah	Oprasional Rumah Singgah	40 orang	250.000.000	
			Pengadaan Peralatan Bantu Bagi Bagi Lanjut Usia (DAK)	Jumlah lanjut usia yang terfasilitasi	9 orang	8.950.000	
			Revitalisasi dan Pengadaan Perangkat pengolah Data Sosial (DAK)	Terfasilitasinya pegawai	100 %	98.626.000	
2	Terkendalnya pertumbuhan penduduk, meningkatnya kesejahteraan keluarga.	Meningkatnya partisipasi KB	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR				
			Program Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Institusi KB	Rasio Petugas Lapangan Keluarga Berencana	100 %	521.306.000	
			Pembinaan dan Fasilitasi kelompok KB	Jumlah kelompok KB yang dibina	270 orang	53.500.000	
			Pembinaan dan Fasilitasi jaringan institusi KB	Jumlah Peserta KB yang difasilitasi jaringan institusi KB	300 orang	150.521.000	
			Pembinaan, Pengembangan dan fasilitasi KKBPK	Jumlah fasilitasi fapsedu	35 unit	74.790.000	
				Jumlah kegiatan fasilitasi kualisi kependudukan			
				Jumlah laporan bulanan			
			Advokasi dan KIE	Jumlah lini lapangan yang dibina	97 orang	116.733.000	

RENCANA KERJA TAHUN 2020
DINSOSDALDUKKBP3A KABUPATEN PURBALINGGA

				Jumlah KIE dan Advokasi melalui media masa			
			Profil dan Analisis data Kependudukan	Jumlah profil kependudukan	309.015 orang	125.762.000	
				Jumlah data keluarga			
				Jumlah kegiatan fasilitasi pendidikan kependudukan			
			Program Peningkatan Pelayanan, Perlindungan dan Pembinaan Kepesertaan KB	Cakupan Pasangan Usia Subur yang Inging ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need KB)	100 %	4.960.476.000	
			Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan, Peserta KB aktif dan Kb baru serta Perlindungan Efek samping KB	Jumlah pembinaan peserta Kb baru dan Kb aktif	152.368 Orang	60.509.000	
				Jumlah pelayanan ayoman medis bagi Peserta KB			
			Penyediaan Sarana dan Prasarana KB (DAK)	Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana untuk pelayanan KB	78 unit	1.331.753.000	
			Pembinaan Program KB Berbasis Masyarakat (DAK Non Fisik)	Jumlah kader PPKBD dan Sub PPKBD yang di bina	1802 orang	1.434.000.000	
			Oprasional Balai Penyuluh (DAK Non Fisik)	Jumlah penyuluh yang di beri bantuan oprasional DAK Non Fisik	100 %	1.861.776.000	

RENCANA KERJA TAHUN 2020
DINSOSDALDUKKBP3A KABUPATEN PURBALINGGA

			Pengadaan media KIE dan Managemen (DAK Non Fisik)	Jumlah Peserta KB Aktif	11.172 unit	193.620.000	
			Pengadaan BKB Kit Stunting (DAK Penugasan)	Jumlah Pengadaan BKB Kit	10 Set BKB Kit	40.375.000	
			Oprasional Distribusi Alokon (DAK Non Fisik)	Pemberian Distribusi Alokon	100 %	98.952.000	
			Program Pemberdayaan Keluarga	Jumlah NKKBS	100 %	1.897.992.000	
			Pembinaan Pengembangan dan Fasilitasi Keluarga Sejahtera	Jumlah kader kelompokBKS yang dibina	240 orang	125.000.000	
				Jumlah kader UPPKS yang dibina			
			Pembinaan Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Reproduksi Remaja	Jumlah kegiatan PIK-R	58 kegiatan	71.000.000	
				Jumlah kegiatan BKB			
			Program KKBPK di Kampung Kb (DAK Non Fisik)	Jumlah kader kelompok BKS dan UPPKS di kampung KB yang dibina	144 orang	1.701.992.000	
3	Meningkatnya keberdayaan perempuan dan perlindungan anak.	Tertanganinya Permasalah Perempuan dan anak	Program Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak tang Tertangani	100 %	514.719.000	
			Penguatan Kelembagaan	Jumlah unit pelayanan terpadu penanganan	1 lembaga	145.656.000	

RENCANA KERJA TAHUN 2020
DINSOSDALDUKKBP3A KABUPATEN PURBALINGGA

			Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terfasilitasi			
				Jumlah penanganan tindak pidana perdagangan orang			
			Pembinaan, Fasilitasi, dan Evaluasi PUG dan PPRG	Jumlah PPRG dan PUG yang terfasilitasi	1 lembaga	176.790.000	
				Jumlah peringatan hari ibu dan hari kartini Tingkat kabupaten			
				Jumlah profil gander yang disusun			
				Jumlah kegiatan gerakan sayang ibu dan bayi (GSIB)			
			Pembinaan, Fasilitasi dan Evaluasi PUHA	Jumlah kecamatan layak anak yang dibentuk	1 lembaga	192.273.000	
				Jumlah peringatan hari anak nasional tingkat kabupaten			

BAB V
PENUTUP

Upaya mewujudkan kabupaten purbalingga menjadi kabupaten termaju di Indonesia wajib dilaksanakan oleh seluruh OPD Se-Kabupaten Purbalingga. Dalam rangka mengimplementasikan seluruh kewenangan bidang urusan sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, maka rencana kerja DINSOSDALDUKKBP3A Tahun 2020 telah disusun secara baik dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di harapkan dokumen rencana kerja tahun 2020 ini dapat dipedomani oleh seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Rencana Kerja (Renja) DINSOSDALDUKKBP3A Tahun Anggaran 2020 merupakan sebuah gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun anggaran berjalan guna untuk merealisasikan tujuan dan sasaran DINSOSDALDUKKBP3A dengan memerhatikan kemampuan anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Purbalingga, APBD Provinsi Jawa Tengah ataupun dari APBN.

Seluruh program dan kegiatan yang direncanakan dihadapkan bisa menutupi seluruh kebutuhan program pengawasan dan sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Purbaingga dan RKPD Provinsi Jawa Tengah yang disesuaikan juga dengan pagu anggaran yang diterima DINSOSDALDUKKBP3A.